



LAPORAN KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 dan disampaikan kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun untuk memenuhi Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengamanatkan setiap pimpinan Eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja BPK. Laporan Kinerja satuan Kinerja Eselon II disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 menyajikan capaian evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam perjanjian kinerja. Pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis tersebut memuat informasi terkait capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja, penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran dan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, Perwakilan Provinsi Maluku berharap Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan perbaikan kinerja perwakilan di Tahun 2023. Dengan demikian, Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan perbaikan dalam kinerjanya secara efektif, efisien dan berkesinambungan, untuk mencapai rencana strategis BPK.

Ambon, 31 Januari 2023

Kepala Perwakilan,



Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN	5
E. SUMBER DAYA.....	6
F. ISU STRATEGIS.....	8
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
A. PERENCANAAN KINERJA.....	9
B. TARGET KINERJA.....	12
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. HASIL EVALUASI AKIP.....	19
B. CAPAIAN KINERJA.....	19
C. ANALISIS EFISIENSI	32
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA	33
E. REALISASI ANGGARAN.....	34
BAB IV	
PENUTUP	39
LAMPIRAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dan penandatanganan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022, perlu disusun suatu Laporan Pencapaian Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, kendala yang dihadapi, dan usulan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam SIMAK BPK RI adalah membandingkan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2022.

Laporan kinerja ini harus disampaikan kepada Auditorat Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI dengan tembusan kepada Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Tugas dan Fungsi,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK mendirikan kantor perwakilan di tiap provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.

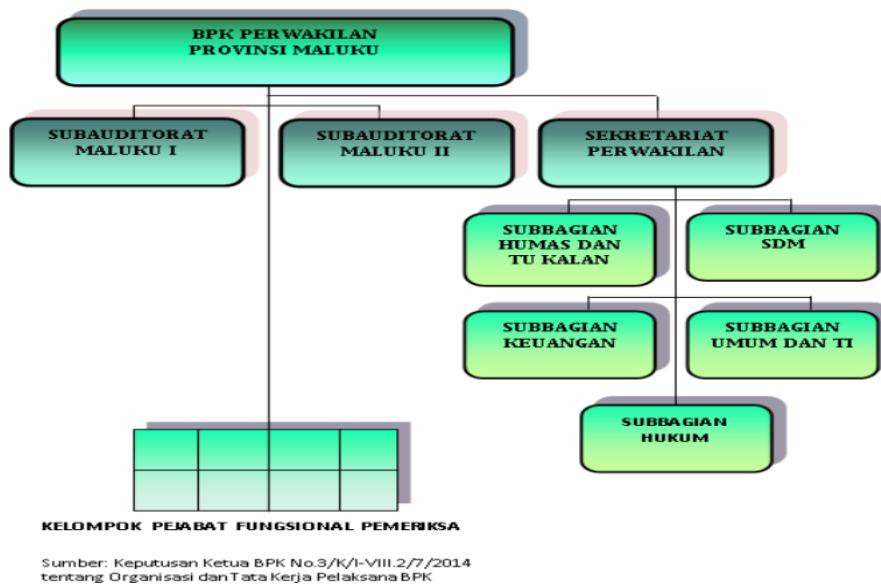
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dibuka pada tanggal 20 Desember 2006 dengan sebutan Kantor Perwakilan BPK RI di Ambon. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019) pada pasal 744 menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi dipimpin oleh seorang kepala.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku, Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melakukan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku memiliki 12 entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 pemerintah provinsi, 2 pemerintah kota, dan 9 pemerintah kabupaten).

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK

Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan membawahi tiga unit kerja sebagai berikut:



A. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan

- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

B. Subauditorat Maluku I

Subauditorat Maluku I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

C. Subauditorat Maluku II

Subauditorat Maluku II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten

Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

D. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 yaitu menyampaikan pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam perjanjian kinerja yaitu Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2022. Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) satuan Kerja eselon II

2. Realisasi pencapaian target kinerja Unit Kerja Eselon II
3. Penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja
4. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis BPK
5. Penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran (penganggaran berbasis kinerja), dan
6. Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

E. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi Maluku memiliki 128 Pegawai dengan Komposisi terdiri dari 75 Pegawai Negeri Sipil, 31 Calon Pegawai Negeri Sipil, dan 22 Tenaga Kontrak. Dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, pegawai lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku mayoritas oleh pegawai pria sebanyak 91 pegawai (71,09%), sementara jumlah pegawai wanita sebanyak 37 orang (28,91%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan Badan Perwakilan Provinsi Maluku telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data, dari 128 Pegawai sebanyak 13 pegawai (10,16%) berpendidikan S2, sebanyak 84 pegawai (65,63%) berpendidikan S1, sebanyak 14 pegawai (10,94%) berpendidikan DIII, dan sisanya sebanyak 17 pegawai (13,28%) berpendidikan SLTA

Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Golongan

Menurut Golongan		
IV/e	:	0
IV/d	:	1
IV/c	:	1
IV/b	:	1
IV/a	:	3
Jumlah Gol IV		6
III/d	:	9
III/c	:	6

III/b	:	4
III/a	:	71
		Jumlah Gol III
II/d	:	1
II/c	:	9
II/b	:	0
II/a	:	0
		Jumlah Gol II
		Jumlah Total Gol I - IV
		106

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa		
Pemeriksa Utama	:	0
Pemeriksa Madya	:	1
Pemeriksa Muda	:	6
Pemeriksa Pertama	:	42
		Jumlah
Mengikuti Diklat JFP	:	0
Dibebaskan	:	11
Non JFP	:	46
Belum Ditetapkan	:	0
		Jumlah Total
		106

2. Sumber Daya Keuangan

Data Pagu Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat dilihat sebagai berikut :

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20,903,316,000	0	18,126,351,138	2,571,574,352	20,697,925,490	99.02 %	205,390,510
CI. Program Pemeriksaan Keuangan Negara	20,903,316,000	0	18,126,351,138	2,571,574,352	20,697,925,490	99.02 %	205,390,510
CI.1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	20,903,316,000	0	18,126,351,138	2,571,574,352	20,697,925,490	99.02 %	205,390,510
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,551,797,000	0	8,676,441,421	813,402,122	9,489,843,543	99.35 %	61,953,457
EBA.994 Layanan Perkantoran	9,551,797,000	0	8,676,441,421	813,402,122	9,489,843,543	99.35 %	61,953,457
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	583,798,000	0	547,107,300	35,800,000	582,907,300	99.85 %	890,700
EBB.951 Layanan Sarana Internal	583,798,000	0	547,107,300	35,800,000	582,907,300	99.85 %	890,700
FAF Pemeriksaan Keuangan Negara	10,767,721,000	0	8,902,802,417	1,722,372,230	10,625,174,647	98.68 %	142,546,353
FAF.051 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	196,084,000	0	194,230,350	0	194,230,350	99.05 %	1,853,650
FAF.059 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	562,346,000	0	562,344,806	0	562,344,806	100.00	1,194
FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	25,692,000	0	0	18,965,344	18,965,344	73.82 %	6,726,656
FAF.091 Sumbangan IHPs Perwakilan	155,356,000	0	146,985,486	5,308,500	152,293,986	98.03 %	3,062,014
FAF.099 Laporan Profil Entitas Perwakilan	7,004,000	0	5,400,000	990,600	6,390,600	91.24 %	613,400
FAF.116 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	178,393,000	0	90,430,000	87,946,400	178,376,400	99.99 %	16,600
FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	172,393,000	0	86,313,000	84,302,630	170,615,630	98.97 %	1,777,370
FAF.174 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	1,154,910,000	0	496,694,780	623,084,967	1,119,779,747	96.96 %	35,130,253
FAF.175 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1,638,561,000	0	1,391,920,997	240,381,872	1,632,302,869	99.62 %	6,258,131
FAF.U37 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	3,423,914,000	0	2,680,317,746	661,391,917	3,341,709,663	97.60 %	82,204,337
FAF.U85 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	3,253,068,000	0	3,248,165,252	0	3,248,165,252	99.85 %	4,902,748

F. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di tahun 2019 sebesar 72,74% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan yang menghambat penyelesaian tindak lanjut.
2. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang berisiko menurunkan reputasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
3. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
4. Jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang seringkali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa mengadakan *in house training* di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

1. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut: **“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”** Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia. Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK

juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

2. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Maluku memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dalam pernyataan misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundangundangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian

kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi; Dalam pernyataan misi ketiga, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital), sumber daya informasi (information capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan (financial capital).

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024 tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu sebagai berikut.

- 1) Independensi Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- 2) Integritas Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- 3) Profesionalisme Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 yaitu **“meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”**. Sedangkan untuk AKN VI (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu **“meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”**. Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Maluku

menetapkan sasaran strategis yaitu “**meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi**”.

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku ingin meningkatkan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini penting bagi BPK, dengan peningkatan mutu pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- 2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- 4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
- 5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
- 6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
- 7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
- 8) Hasil Evaluasi AKIP
- 9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
- 10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
- 11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas komunikasi
- 12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
- 13) Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 telah disepakati oleh Kepala Perwakilan dan Tortama KN VI yang dituangkan dalam PKPK 2022. Adapun rincian Sasaran Strategis (SS), dan target

Indikator Kinerja Unit (IKU), dan Target Indikator Kinerja Keluaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator dan Target Kinerja BPK RI Perwakilan Maluku Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemeriksaan berkualitas • Meningkatnya layanan pemeriksaan 	Rp33.468.338.000 Rp.10.237.229.000 Rp.23.231.109.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dokumen rencana aksi BPK RI Perwakilan Maluku maka ditetapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker

pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei:
 - a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
 - b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
 - c. 3,00 - 3,99 = memuaskan
 - d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi dan nilai dasar BPK.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai

kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metodemetode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 40 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September 2022, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Adapun Detail Rencana Aksi BPK Perwakilan Maluku dilampirkan Pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUASI AKIP

Evaluasi AKIP yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPK RI. Berdasarkan Nota Dinas Inspektor Utama Nomor 418/ND/XI/09/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai sebesar 89,75 dengan predikat A (Memuaskan). Adapun hasil evaluasi yang telah ditindaklanjuti oleh BPK Perwakilan Maluku sesuai dengan ND Inspektor Utama Nomor 251./ND/XI/07/2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas informasi mengenai pembandingan antara realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun (periode akhir renstra) untuk seluruh indikator kinerja
2. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja
3. Menyajikan informasi keuangan baik anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau kinerja tertentu

B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan SIMAK periode Triwulan IV Tahun 2022 meliputi 13 IKU, dimana Perwakilan mendapatkan skor IKU keseluruhan 98,27. Berikut adalah rincian pencapaian IKU yang dimaksud:

Tabel 3
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	98,46%	98,46

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	67,39%	89.85
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	102,13%	102.13
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,76	95.2
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	89,75	101.99
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	85,19%	87.83
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,74	98.42
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,33%	97.33
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	92,84%	105
Skor Akhir				98,27%

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU Tahun 2022

Adapun capaian kinerja, evaluasi dari masing-masing sasaran strategis akan diuraikan dibawah ini.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

a. IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan)

Quality Control (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan dilaksanakan setelah pemeriksaan selesai. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2022 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan, dimana QA dan QC seluruhnya dilaksanakan pada 12 pemeriksaan LKPD TA 2021. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyelesaikan 5 Pemeriksaan Kinerja dan 2 Pemeriksaan Kepatuhan tahun 2022, dimana QA dan QC juga telah dilaksanakan seluruhnya pada 6

pemeriksaan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor sebesar 96,92%, dimana skor tersebut didapat dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 92,31%, dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 100%. Selain itu, hasil reviu Inspektorat Utama yang merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor penilaian sebesar 100%. Capaian-capaian tersebut menghasilkan skor IKU 1 sebesar 98,46%. Realisasi tersebut belum memenuhi target tahunan yaitu 100%.

b. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 100%. Terdapat 21 Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2022 yaitu 100%.

c. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)

Pemantauan TLRHP pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember s.d 16 Desember 2022 sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 331/ST/XIX.AMB/11/2022 tanggal 5 Desember 2022. Sampai dengan Laporan IKU Triwulan IV Tahun 2022 disusun, realisasi penyelesaian TLRHP Triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 67,39 %, dengan rincian: sebanyak 9.337 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti; 3.601 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti; 1.128 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan 436 rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Realisasi tersebut belum sesuai dengan target Tahun 2022 yaitu sebesar 75%.

d. IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan 7 Pemeriksaan Tematik Nasional sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2022 yaitu 7.

e. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan)

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

f. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)

Pemeriksaan Tematik Lokal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan, dimana Pemeriksaan Tematik Lokal berjumlah 2. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2022 yaitu 2.

g. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku menunjukkan skor sebesar 4,76. Realisasi ini belum sesuai dengan target Tahun 2022 yaitu 5,00 tetapi meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,44.

h. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)

Evaluasi AKIP yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPK RI. Berdasarkan Nota Dinas Inspektor Utama Nomor 251/ND/XI/07/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai sebesar 89,75 dengan predikat A (Memuaskan). Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan yaitu sebesar 88,00 dengan predikat A (Memuaskan).

i. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)

Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi berdasarkan data dari Biro TI sampai dengan Triwulan IV 2022 adalah sebesar 85,19%, yang dapat dirinci sebagai berikut: tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM sebesar 98,59%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 63,82%, tingkat pemanfaatan aplikasi SMP sebesar 77,09%, tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP sebesar 77,42%, tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL sebesar 100,00%, Pencapaian tersebut belum sesuai dengan target tahun 2022 yakni sebesar 97%.

j. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah membuat usulan atas Best Practice melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku No. 303/ND/XIX.AMB/09/2022 yang berjudul Optimalisasi dan Efisiensi Pengumpulan Produk Hukum Daerah Provinsi Maluku. Atas realisasi tersebut, maka IKU 10 mendapatkan nilai 100%. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyampaikan empat Laporan Pelaksanaan Aktivitas *Knowledge Management* yang terdiri dari aktivitas Pendidikan dan Pelatihan, *Coaching*, Bantuan Rekan Sejawat, serta Forum Berbagi Pengetahuan. Atas realisasi ketiga poin tersebut mendapatkan nilai 100%. Realisasi ini telah sesuai target tahun 2022 yaitu 100%.

k. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)

Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor sebesar 3,74. Realisasi ini lebih tinggi dari target Tahun 2022 yaitu 3,80.

l. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Triwulan I Tahun 2022. Sampai dengan periode pelaporan IKU, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mencatat presentase

pegawai yang memenuhi standar jam Diklat Pengembangan Kompetensi sebesar 97,33%, atau 73 dari 75 pegawai.. Persentase ini belum memenuhi target Tahun 2022 yaitu 100%.

m. IKU 13 (Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran)

Hasil Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2022 belum dilakukan oleh Biro Keuangan, sehingga penilaian BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk IKU 13 mengacu pada capaian Triwulan III yakni 105% dengan rincian: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 92,91% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 92,79%. Persentase ini sudah melebihi target Tahun 2022 yaitu 88%.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2022

a. IKK 1 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan 12 Pemeriksaan LKPD, 7 Pemeriksaan Kinerja, dan 2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Keseluruhan LHP atas pemeriksaan tersebut telah disampaikan tepat waktu, sehingga ketepatan waktu pemyampaian LHP Tahun 2022 adalah 100%. Realisasi ini telah sesuai dengan target tahun 2022.

b. IKK 2 (Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik pada 12 entitas di wilayah Provinsi Maluku dengan output 125 laporan. Keseluruhan LHP atas pemeriksaan tersebut telah disampaikan tepat waktu.

c. IKK 3 (Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat kepada Kepala Direktorat EPP melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 282/ND/XIX.AMB/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang berjudul Pendapat BPK Tentang Standar Harga Satuan Regional di Daerah Bercirikan Kepulauan.. Atas usulan tersebut, Kepala Direktorat EPP telah menerbitkan hasil kajian dan menyetujui usulan bahan pendapat tersebut

melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP No.456/ND/XII.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

d. IKK 4 (Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah merealisasikan dua sumbangan IHPS pada Tahun 2022, yang direalisasikan pada tiap semesternya. Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP sebesar 100%.

e. IKK 5 (Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah merealisasikan dua sumbangan IHPS pada Tahun 2022, yang direalisasikan pada tiap semesternya. Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP sebesar 100%.

f. IKK 6 (Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada semester I dan II. Atas kegiatan pemantauan tersebut, telah direalisasikan 24 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada 12 entitas pemeriksaan. Atas realisasi tersebut, tingkat pemutakhiran data adalah 100%.

g. IKK 7 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada semester I dan II. Atas kegiatan pemantauan tersebut, telah direalisasikan 24 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada 12 entitas pemeriksaan. Laporan tersebut telah diterbitkan dan diinput pada aplikasi SIKAD pada bulan Juli dan Desember. Atas realisasi tersebut, tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah adalah 100%.

b. IKK 8 (Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan pemeriksaan interim pada 12 pemeriksaan LKPD dan 5 pemeriksaan kinerja. Laporan Hasil Pemeriksaan Interim diterbitkan setelah pemeriksaan interim dilaksanakan yaitu bulan Maret dan September 2022. Atas realisasi tersebut, Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan pada tahun 2022 adalah 100%.

i. IKK 9 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaporkan Laporan Manajemen Pemeriksaan bersamaan dengan laporan bulanan. Laporan tersebut disusun dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Atas realisasi tersebut, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan adalah 100%.

j. IKK 10 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaporkan Laporan Manajemen Internal bersamaan dengan laporan bulanan. Laporan tersebut disusun dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Atas realisasi tersebut, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal adalah 100%.

k. IKK 11 (Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor)

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku merealisasikan 2 kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 Kendaraan bermotor roda dua dan 1 kendaraan bermotor roda empat. Realisasi tersebut telah sesuai dengan target tahunan.

l. IKK 12 (Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan)

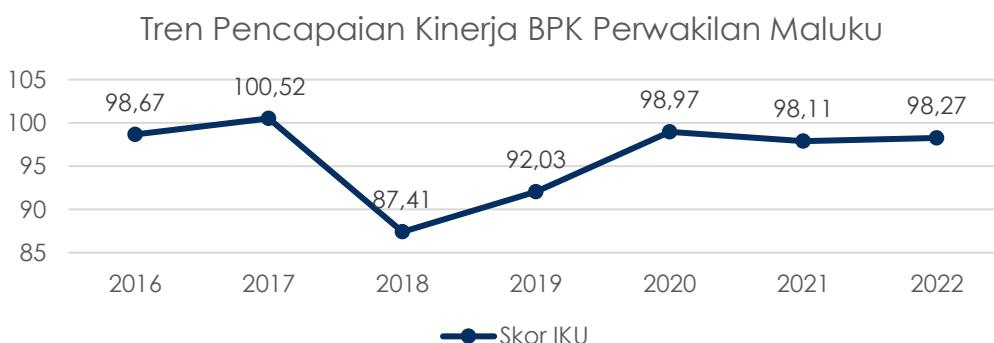
Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 99,91%. Realisasi tersebut melebihi target tahunan yaitu 95%.

m. IKK 13 (Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 98,57%. Realisasi tersebut telah melebihi target tahunan yaitu 95%.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukan dengan skor capaian kinerja IKU pada Tahun 2016 sebesar 98,67, kemudian meningkat di Tahun 2017 sebesar 100,52. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 87,41. Pada tahun 2019, Perwakilan Maluku kembali dapat meningkatkan skor capaian IKU menjadi 92,03. Skor IKU tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Kembali meningkat menjadi sebesar 98,97, sedangkan skor IKU tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,11. Pada akhirnya, skor IKU tahun 2022 adalah sebesar 98,27.



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku sampai tahun 2022 cukup relatif stabill sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun Renstra 2020 – 2024. Hal ini ditunjukan dengan skor pencapaian kinerja IKU pada tahun 2021 sebesar 98,11, kemudian pada tahun 2022 sebesar 98,27. Hal ini cukup relatif stabil terhadap target Renstra 2020 – 2024.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah

	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Percentase Realisasi Tahun 2022 dibanding Target Kinerja Tahun 2024
		2020	2021	2022		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	91,67%	88,46%	98,46%	100%	98,46%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	73,13%	69,40%	67,39%	75%	89,85%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,71%	100,45%	102,13%	100%	102,13%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100,00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,53%	100%	100%	100,00%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,59	4,44	4,76	5,00	95,20%
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,90	87,86	89,75	90,05	99,67%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,71%	98,71%	85,19%	95%	89,67%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100,00%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,06	3,98	3,74	3,80	98,42%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	90,24%	97,37%	97,33%	100%	97,33%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,78%	86,01%	92,84%	89,5%	103,73%

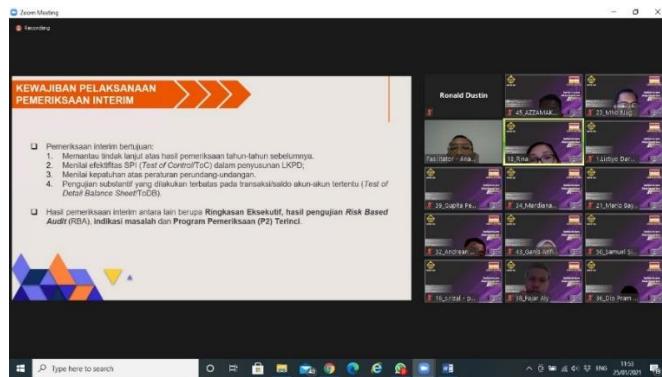
4. Analisis program/output yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Perwakilan Provinsi Maluku pada Tahun 2022 merupakan usaha bersama serta sinergi antara pimpinan dan staf. Adapun beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai kinerja perwakilan antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *in house training*

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2021, Perwakilan Provinsi Maluku melakukan *in house training* berupa rangkaian Diklat

persiapan Pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan Pusdiklat. Materi yang disampaikan terkait dengan teknik pemeriksaan infrastruktur, diklat penggunaan SiAP LK, serta diklat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Pelaksanaan diklat pemeriksaan dilakukan dengan metode daring mengingat kondisi pandemi.



Gambar 3.1 Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD

- b. Pembuatan Infografis dan Buku Saku Panduan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BPK (*Independensi, Integritas Dan Profesionalisme*) di Lingkungan BPK Perwakilan Maluku.

Belum adanya sosialisasi maupun panduan yang memadai terkait nilai-nilai dasar BPK (Integritas, Independensi dan profesionalisme) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang tercermin dengan Indeks Kinerja Utama 7 Implementasi Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK Perwakilan Maluku pada tahun 2021 berada pada angka 4,44. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yakni 5,00 dan kondisi lobi, ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan website yang belum memiliki informasi mengenai nilai-nilai dasar BPK kepada pihak eksternal seperti pada umumnya yang ada di kantor-kantor publik. Untuk itu Pembuatan infografis dan buku saku panduan ini bermaksud untuk mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman nilai – nilai dasar BPK kepada para pegawai BPK Maluku. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan capaian IKU 7, hal ini tercermin pada pencapaian IKU 7 tahun 2022 sebesar 4,76 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 3.2 Sosialisasi Nilai – Nilai Dasar BPK

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, serta rencana aksi/upaya dalam peningkatan kedepan.

Secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah mencapai target kinerja pada Tahun 2022. Adapun keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya arahan dari pimpinan di BPK Pusat dan kerja sama antar pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja yang memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 7 indikator, yaitu IKU 2 terkait Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, Kualitas Komunikasi dan IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Adapun beberapa capaian kinerja yang tidak tercapai beserta analisa penyebab penurunan kinerja sebanyak 5 indikator, yaitu IKU 1, IKU 3, IKU 7, IKU 12, dan IKU 13. Penjelasan atas indikator signifikan yang menyebabkan penurunan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan belum memenuhi target yang ditetapkan. Kekurangan ini disebabkan oleh evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan

Provinsi Maluku mendapatkan nilai 96,92%. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan nilai 92,31%, walaupun begitu, tingkat akurasi atas LHP yang hanya mendapatkan nilai 100%. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan reviu LHP secara berjenjang, mendorong pegawai untuk lebih memperhatikan konsistensi penulisan LHP, serta akan melakukan reviu redaksional atas konsep LHP sebelum diterbitkan.

- 2) IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum mencapai target yang disebabkan beberapa entitas yang masih sangat minim dalam menindaklanjuti rekomendasi, sehingga sangat berpengaruh pada persentase keseluruhan. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan meningkatkan koordinasi dengan entitas-entitas di Provinsi Maluku agar masalah-masalah yang menghambat penyelesaian Tindak Lanjut dapat diselesaikan.
- 3) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 4,76. Walaupun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 5,00. Atas kekurangan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus mendorong pemahaman pegawai serta mensosialisasikan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK RI.
- 4) IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi belum memenuhi target. Jika dirinci lebih jauh, maka penyebabnya dikarenakan pemanfaatan Aplikasi Jasmin hanya mencapai 63,82%, Tingkat Pemanfaatan Aplikasi SMP hanya 77,09% dan Tingkat Pemanfaatan Aplikasi SiAP hanya 77,42%. Untuk meningkatkan pemnafaatan

aplikasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu mensosialisasikan dan mendorong pemanfaatan serta monitoring secara berkala terhadap pemanfaatan aplikasi – aplikasi tersebut.

- 5) IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi belum memenuhi target. Pencapaian untuk IKU 11 sebesar 3,74 dan masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3,80. Untuk itu BPK Perwakilan Maluku akan meningkatkan sinergi serta lebih komunikatif dalam berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 6) IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya atau 100% tercapai. Dari 75 Pegawai, terdapat 2 Pegawai yang belum memenuhi standar pemenuhan jam diklat yang ditetapkan. Atas ketidaktercapaian tersebut, maka BPK Perwakilan Maluku akan mendorong dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan jam diklat Pengembangan kompetensi Pegawai. Atas kondisi tersebut di atas, Perwakilan Provinsi Maluku juga akan melakukan peningkatan capaian kinerja khususnya terhadap kegiatan Tahun 2022 yang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan mendorong pejabat struktural dan fungsional agar lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat meraih hasil yang lebih baik di Tahun 2023.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam meraih capaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perwakilan. Sumber daya tersebut bersumber dari anggaran perwakilan Sumber daya lain yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan adalah optimalisasi kinerja pegawai Perwakilan Provinsi Maluku dalam melaksanakan seluruh rencana kerja perwakilan selama satu tahun anggaran. Setiap pegawai mendapat pengarahan langsung dan jelas dari atasan langsung masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, maka dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, serta pemantauan atas progres pencapaian kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka efisiensi penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu. Penggunaan media *zoom* pada pelaksanaan rapat dilakukan dalam rangka mengurangi biaya rapat seperti belanja konsumsi rapat, ATK, dan biaya lainnya yang berkaitan. Selain mengurangi biaya, melakukan rapat secara daring juga bisa membuat rapat menjadi lebih rutin dikarenakan dinilai lebih praktis.

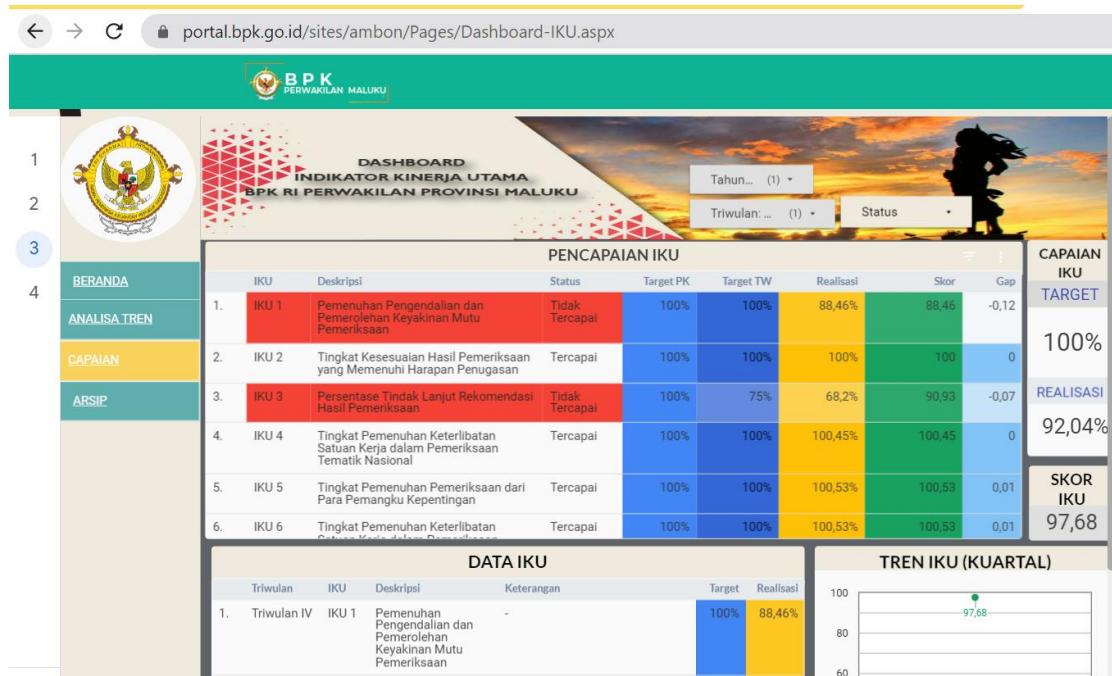
Efisiensi dalam pengelolaan BMN dilakukan dengan melakukan penghapusan BMN secara berkala atas aset yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi biaya pemeliharaan atas aset yang tidak digunakan.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan melakukan rapat berkala terkait penyerapan anggaran serta rencana kegiatan kedepannya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Ketersediaan anggaran akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan kedepannya sehingga kegiatan dapat tetap dilaksanakan namun dengan penyesuaian berdasarkan keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi pemantauan pencapaian kinerja, dimana satuan kerja akan membuat proyeksi pencapaian kinerja secara efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

Perubahan budaya kerja dilakukan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan meningkatkan pemantauan pencapaian kinerja pada tahun 2022. Hal ini dilaksanakan dengan dibuatnya portal yang mempermudah para pemangku kepentingan dalam memantau progres pencapaian kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Monitoring pencapaian kinerja BPK Maluku dapat di pantau pada <https://portal.bpk.go.id/ambon> yang dimana merupakan portal perwakilan. Satu satu modul yang tersedia adalah Dashboard Indikator Kinerja sebagai salah satu *tools* monitoring pimpinan dalam melakukan memantau progress pencapaian kinerja BPK Maluku.



Gambar 3.3 Dashboard Indikator Kinerja BPK Maluku

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam meraih capaian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Perwakilan Provinsi Maluku dengan Tortama KN VI, Perwakilan Provinsi Maluku telah mengupayakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Tahun 2022 selama masa pandemi *Covid-19*. Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tahun 2022 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, sesuai dengan revisi DIPA Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh anggaran senilai Rp30.736.717.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) senilai Rp9.536.461.000,00 dan anggaran Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP) senilai Rp21.200.256.000,00..

Berdasarkan RKP Tahun 2022, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.536.461.000,00 sampai bulan Desember

Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp9.391.821.056,00 atau sebesar 99,48%. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2022, yaitu:

Tabel 3 Realisasi RKP TA 2022

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Laporan	100%	31.274.000	21.966.250	70,24
2.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	100%	1.454.725.000	1.376.496.397	94,62
3.	Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan IHPS	100%	157.806.000	149.252.763	94,58
4.	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	32	32	Laporan	100%	4.311.283.000	4.267.978.133	99,00
6.	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	48	48	Laporan	100%	431.774.000	430.204.500	99,64
7.	Laporan Profil Entitas	12	12	Laporan	100%	15.808.000	12.911.173	81,67
8.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku	130	119	Laporan	100%	133.854.000	133.854.000	100,00
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	18	18	Laporan	100%	2.999.937.000	2.999.157.300	99,97

1. Rumusan Bahan Pendapat

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 1 output Rumusan Bahan Pendapat, yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp31.274.000,00. Namun sehubungan dengan kegiatan penyampaian bahan pendapat yang dibatasi secara daring diakibatkan pandemi Covid-19, penyerapan anggaran tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Realisasi Rumusan Bahan Pendapat adalah Rp21.966.250,00 atau 70,24%.

2. Layanan Administrasi Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 12 output layanan administrasi pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp1.454.725.000 dan

realisasi sebesar Rp1.376.496.397 atau 94,62%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target

3. Sumbangan IHPS

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 2 Sumbangan IHPS yang merupakan output keluaran semesteran, dengan anggaran sebesar Rp157.806.000 dan realisasi sebesar Rp149.252.763 atau 94,58%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

4. LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 32 LHP yang terdiri dari pemeriksaan LKPD, Kinerja, dan PDTT, dengan anggaran sebesar Rp4.311.283.000 dan realisasi sebesar Rp4.267.978.133 atau 99,00%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

5. Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 48 Laporan Pemantauan yang terdiri pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kerugian daerah pada 12 entitas yang dilakukan setiap semester, dengan anggaran sebesar Rp431.774.000 dan realisasi sebesar Rp430.204.500 atau 99,64%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

6. Laporan Profil Entitas

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 12 Laporan Profil Entitas, dengan anggaran sebesar Rp15.808.000 dan realisasi sebesar Rp12.911.173 atau 81,67%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, namun sehubungan dengan kegiatan penyampaian bahan pendapat yang dibatasi secara daring diakibatkan pandemi Covid-19, penyerapan anggaran tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

7. LHP atas Banparpol Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 119 LHP Banparpol yang yang didasarkan atas pemeriksaan parpol pada 12 entitas di wilayah Provinsi Maluku, dengan anggaran sebesar Rp133.854.000 dan realisasi sebesar Rp133.854.000 atau 100%. Keluaran ini tidak sesuai dengan rencana (130 LHP) dikarenakan beberapa parpol tidak menyerahkan LPJ Banparpol sehingga pemeriksaan atas Banparpol yang bersangkutan tidak bisa dilaksanakan.

8. LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 18 LHP Interim yang terdiri dari pemeriksaan LKPD, Kinerja, dan PDTT, dengan anggaran sebesar Rp2.999.937.000 dan realisasi sebesar Rp2.999.157.300 atau 99,97%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

Sedangkan, berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Pendukung (RKSP), BPK Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp21.200.256.000,00. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp20.524.523.186,00 atau sebesar 96,81%. Adapun berbagai output/keluaran yang telah dihasilkan sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Realisasi RKSP TA 2022

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20	Laporan	100	Rp1.811.989.000,00	Rp1.794.849.571,00	99,05
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34	34	Laporan	100	Rp10.649.750.000,00	Rp10.511.443.998,00	98,70
3.	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan	100	Rp8.738.517.000,00	Rp8.218.229.617,00	94,05

1. Layanan Sekretariat Perwakilan

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 20 output Layanan Sekretariat Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp1.794.849.571,00,

yang terdiri dari output layanan pada masing-masing unit kerja di Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target yaitu 99,05%.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 34 output layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran sebesar Rp10.511.443.998,00 dan realisasi sebesar Rp10.649.750.000,00 atau 94,62%. Output layanan tersebut terdiri dari pengadaan 3 kendaraan bermotor dan pengadaan 31 peralatan fasilitas perkantoran. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

3. Layanan Perkantoran

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah keluaran layanan perkantoran yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran sebesar Rp8.218.229.617,00 dan realisasi sebesar Rp8.738.517.000,00 atau 94,62%. Realisasi gaji dan tunjangan adalah sebesar 92,81%, sedangkan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 95,65%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Pengukuran Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku selama Tahun 2022 sekaligus evaluasi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Secara keseluruhan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas sasaran strategis Tahun 2022 mencapai skor sebesar 98,32 dari target skor sebesar 100,00. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, Perwakilan Provinsi Maluku telah mencapai target yang telah ditetapkan..

Selanjutnya, informasi pencapaian kinerja dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi pimpinan BPK RI dalam melakukan evaluasi agar dapat segera mengambil keputusan yang efisien dan efektif, serta dapat berguna bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam memperoleh gambaran mengenai arah dan fokus pelaksanaan kegiatan BPK RI dimasa mendatang.

Pada akhirnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan penyempurnaan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun sehingga dapat memberi kontribusi yang memadai bagi kinerja BPK RI secara keseluruhan (BPK *Wide*).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Aksi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	<p>Triwulan I-IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengendalian mutu pemeriksaan melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC))
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I: -</p> <p>Triwulan II: Menyusun LHP atas LKPD yang tertuang dalam Program Pemeriksaan</p> <p>Triwulan III: Menyusun LHP atas Kinerja dan PDTT yang tertuang dalam Program Pemeriksaan</p> <p>Triwulan IV: Menyusun LHP Kinerja dan PDTT yang tertuang dalam Program Pemeriksaan</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 3	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.
			Triwulan II: Melaksanakan Pemantauan atas TLRHP Semester I Tahun 2022					
			Triwulan III: Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.					
			Triwulan IV: Melaksanakan Pemantauan atas TLRHP Semester II Tahun 2022					
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: -
			Triwulan II: -					
			Triwulan III: Melaksanakan perencanaan dan pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional					
			Triwulan IV:					

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Melaksanakan Pemeriksaan dan Penyusunan LHP Tematik Nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Triwulan I-IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengantisipasi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; • Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I: -</p> <p>Triwulan II: -</p> <p>Triwulan III: Melaksanakan perencanaan dan pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal</p> <p>Triwulan IV: Melaksanakan Pemeriksaan dan Penyusunan LHP Tematik Lokal</p>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<p>Triwulan I-III: Kepala Perwakilan memantau dan memberikan pengarahan kepada pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK</p> <p>Triwulan IV:</p>

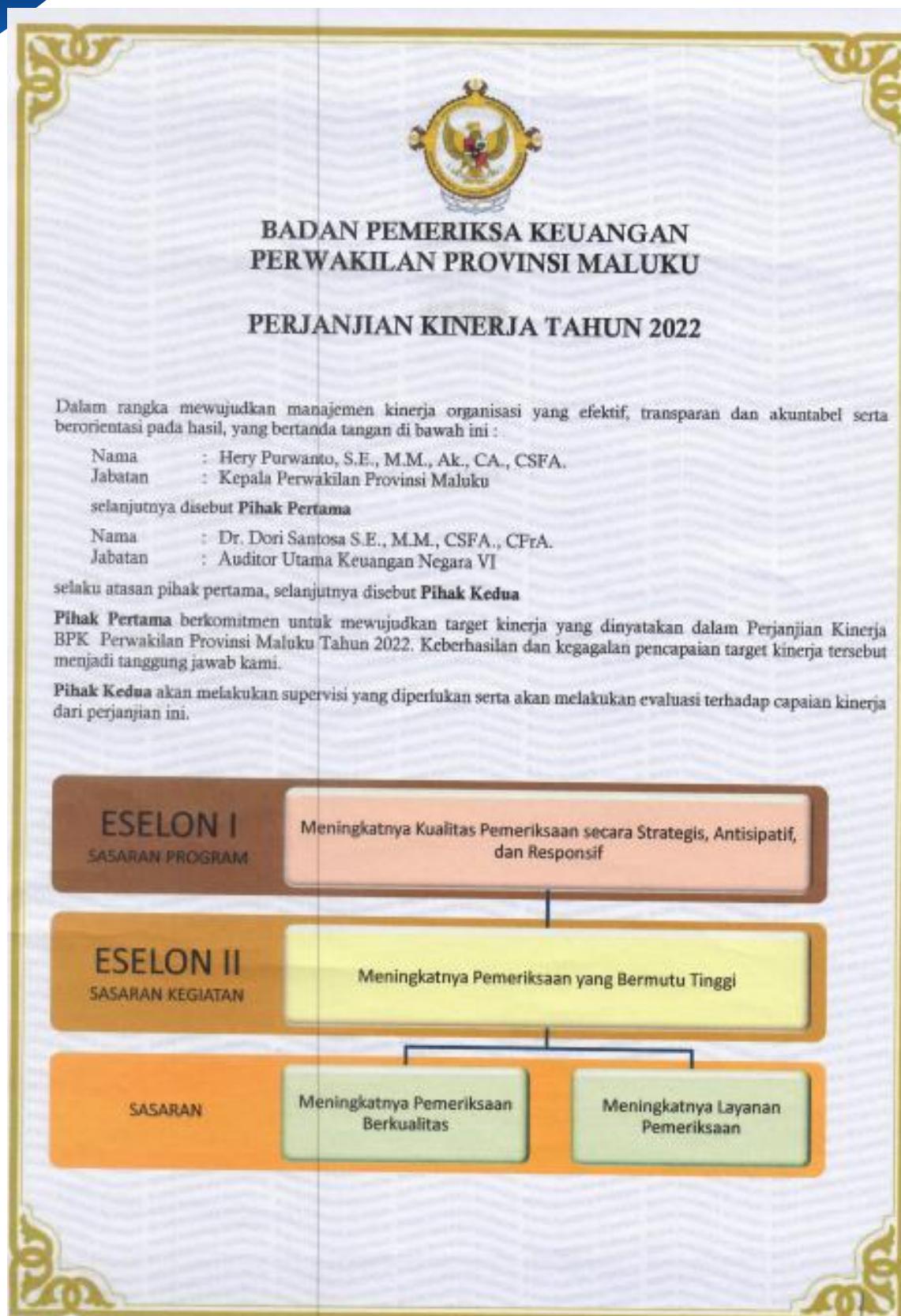
Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Oktober	Triwulan I-III: Melaksanakan rapat berkala terkait realisasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran
								Triwulan IV: Melaksanakan rapat berkala terkait realisasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Tahun 2021
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember	Triwulan I-IV: Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan memberikan pelayanan kepada pegawai terkait pemanfaatan teknologi informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none">Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2021Inventarisir usulan Best Practice di PerwakilanMelaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan
								Triwulan II <ul style="list-style-type: none">Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none">Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP					
			TW I		TW II		TW III		TW IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)									
											<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja yang dapat dijadikan sebagai Best Practice <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Menyusun serta menyampaikan usulan Best Practice kepada Ditama Revbang. Untuk usulan Best Practice yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan sharing knowledge pada pihak lain. 						
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Triwulan I-IV:</p> <p>Meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan</p>								
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	50%	65%	75%	85%	95%	100%	Desember	<p>Januari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Januari: Melaksanakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2021 di Perwakilan Maluku Januari: Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti rangkaian diklat Triwulan I Tahun 2022. <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Februari: memantau pelaksanaan diklat TW I oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
											<ul style="list-style-type: none"> • Maret: memantau pelaksanaan diklat TW I oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	
											<p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> • April: Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti rangkaian diklat Triwulan II Tahun 2022 	
											<p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mei: memantau pelaksanaan diklat TW II oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	
											<p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juni: memantau pelaksanaan diklat TW II oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	
											<p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juli: Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti rangkaian diklat Triwulan III Tahun 2022. 	
											<p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agustus: memantau pelaksanaan diklat TW III oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	
											<p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> • September: memantau pelaksanaan diklat TW III oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	
											<p>Oktober :</p>	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
											<ul style="list-style-type: none"> • Oktober: Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti rangkaian diklat Triwulan IV Tahun 2022 	
											<p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> • November: memantau pelaksanaan diklat TW IV oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku 	
											<p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desember: memantau pelaksanaan diklat TW IV oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku • Desember: Melaksanakan Diklat Kesekretariatan untuk Pegawai Sekretariat di Perwakilan Maluku 	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember	Triwulan I-IV:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Anggaran • Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan 			

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja

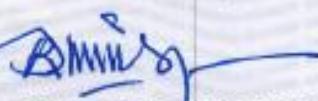


INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pernyataan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

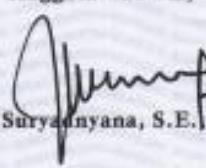
Pihak Kedua,


Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA.,
CFrA.

Pihak Pertama,


Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA.,
CSFA.

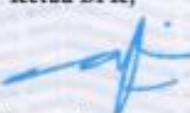
Diketahui oleh:
Anggota VI BPK,


Nyoman Adhi Suryaenyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK,


Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,


Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,
CFrA., CGCAE., QGIA.